



LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2023 Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan. Dokumen LKPJ ATA 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pendukung yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Sangat disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, serta masih ada kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan selama penyusunan. Namun demikian diharapkan laporan ini dapat dipergunakan sesuai harapan dan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.

Painan, 30 Januari 2024

Kepala,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
NIP. 197705221997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	5
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	5 12
2.2. Kebijakan Strategis	12
2.3. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Kinerja Program yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	16
2.4. Kebijakan Strategis	17
2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023	
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	18
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Diatasnya	18
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Dibawahnya	18
BAB IV PENUTUP	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui pemantapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi badan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Dan diturunkan dengan Peraturan Bupati No. 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Bagian Sekretariat
 - a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan
4. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Pangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah 35 orang dengan jabaran pada tabel di bawah ini :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	11
2	Sarjana	19
3	Diploma	1
4	Tamat SMA	4

Sumber : *Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022*

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang ber Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- f. Paraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Paraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026;
- i. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- j. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai gambaran capaian kemajuan Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu satu tahun, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan, dan 31 Sub-Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.044.151.562,- dan realisasi sebesar Rp. 5.886.282.023,- atau dengan capaian sebesar 97,39%. Adapun uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023.

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
BAPEDALITBANG KAB. PESISIR SELATAN							6.044.151.562	5.886.282.023
1	Urusan Perencanaan						5.839.141.787	5.683.942.243
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Nilai	A	A	5.385.321.667	5.217.599.120
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	78.390.256	78.335.400
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	dokumen	7	7	78.390.256	78.335.400
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	laporan	23	23	0	0
		Administrasi Keuangan Daerah	-	-	-	-	3.885.269.752	3.801.841.496

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	40	40	3.788.338.413	3.727.853.596
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	2	2	96.931.339	73.987.900
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	667.653.876	647.949.334
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2	2	17.015.272	16.391.700
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2	35.811.043	35.793.965
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	19.787.961	19.737.450
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	2	2	18.600.000	16.220.000
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	1	1	22.730.000	22.492.150
		- Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1	1	553.709.600	537.314.069
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	58.817.310	58.817.310
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	paket	1	1	58.817.310	56.060.400

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	342.958.088	326.097.300
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	3	3	112.292.000	97.505.667
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	3	3	230.666.0880	228.591.633
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	183.218.967	179.672.367
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	1	1	61.690.000	60.058.767
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	8	8	68.950.217	67.644.850
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	34	34	26.100.000	26.055.550
		- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	26.478.750	25.913.200
		Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	25	24,15	474.908.664	462.622.156

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	-	465.523.761	453.640.256
		- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	3	3	465.523.761	453.640.256
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	75.718.490	31.235.150
		- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	masukan	2	2	8.573.826	8.178.900
		- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	orang	26	26	811.077	803.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	25	24,15	464.897.304	441.691.834
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	166.156.244	156.183.419
		- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	1	1	754.800	754.500
		- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	1	1	3.721.500	3.721.500

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	3	3	92.053.810	90.875.500
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	-	-	-	-	26.493.093	26.493.093
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	6.745.505	4.939.200
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	dokumen	1	1	6.287.519	3.204.290
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	4	6.747.850	5.079.000
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	dokumen	1	1	6.712.219	3.630.200
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	24.901.671	19.159.600
		- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	3	3	13.801.040	12.339.400

No.	Urusan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	5	6	7	8	9	10	11
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	1	1	7.623.755	4.183.200
		- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	1	1	3.476.876	2.637.000
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah						205.009.775	202.339.780
		Penelitian dan Pengembangan Daerah					205.009.775	202.339.780
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	171.310.031	169.354.255
		- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data Kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	laporan	3	3	171.310.031	169.354.255
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	-	33.699.744	32.985.525
		- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	2	2	33.699.744	32.985.525

2.2. Kebijakan Strategis

Tabel 2.2. Sasaran Strategis PK Kepala Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	43,2	42,08	97,41%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
2	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan	90%	90%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	62,32 (sangat inovatif)	58,34	93,61%
			Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	100	97	97%
3	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A	A (89,96)*	100%*

*Nilai Tahun 2022

2.3. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Kinerja Program yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan

➤ Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Target Kinerja : **43,2** / Realisasi Kinerja : **42,08**

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD, serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui

pelaksanaan :

(1) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

➤ Pagu Anggaran : Rp. 474.908.664,-

➤ Realisasi : **Rp. 462.622.156,- (97,41 %)**

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ✓ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - ✓ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

(2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

➤ Pagu Anggaran : Rp. 147.924.874,-

➤ Realisasi : **Rp. 131.363.790,- (88,80 %)**

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - ✓ Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

2) Meningkatkan Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

➤ **Persentase Kajian Kelitbangan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD**

(Target Kinerja : **90%** / Realisasi Kinerja : **100%**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan persentase kajian kelitbangan yang disusun dan diterapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

➤ **Indeks Inovasi Daerah**

(Target Kinerja : **62,32 (sangat inovatif)** / Realisasi Kinerja : **58,34**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang diberikan oleh Kemendagri. Indeks ini hasil penilaian inovasi tahun 2022 yang keluar tahun 2023. Untuk hasil indeks tahun 2023 dikeluarkan oleh kemendagri tahun 2024.

➤ **Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang**

(Target Kinerja : **100** / Realisasi Kinerja : **97**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai kematangan inovasi

yang diperoleh saat melakukan pengentrian di aplikasi IGA. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Pagu Anggaran : Rp. 205.009.775,-
- Realisasi : **Rp. 202.339.780,- (98,70%)**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - ✓ Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan.
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - ✓ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

➤ **Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat**

(Target Kinerja : **A** / Realisasi Kinerja : **A (89,96)**)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik “*criteria referenced survey*”, dengan cara menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pagu Anggaran : Rp. 5.216.308.249,-
- Realisasi : **Rp. 5.089.956.297,- (97,58%)**
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari uraian program dan kegiatan diatas, seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator dari 4 sasaran Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

2.4. Kebijakan Strategis

Untuk Tahun 2023 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tidak melakukan kebijakan strategis apa pun terhadap program, kegiatan, maupun sub kegiatan di Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu membuat inovasi, kreasi, dan terobosan-terobosan yang mampu merubah serta meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lebih baik dari sebelumnya.	Pada tahun 2023 seluruh Kepala Perangkat Daerah telah membuat inovasi, dan telah diinput ke aplikasi Kemendagri untuk penilaian. Inovasi tersebut sebagian telah diimplementasikan.	Dengan telah dijadikannya inovasi sebagai perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, hal ini menjadi sejalan dengan visi, misi, dan program aksi

BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Diatasnya

Tabel 3.1. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023.

NO.	Perangkat Daerah	Program	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
NIHIL					
Total					

Sumber: Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.

3.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Dibawahnya

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2023.

NO.	Perangkat Daerah	Program	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
NIHIL					
Total					

Sumber: Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 tidak memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan dibawahnya dalam bentuk Tugas Pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan. Dan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2023 memiliki capaian sebesar 97,39% dalam melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.886.282.023,- dari total Pagu anggaran sebesar Rp. 6.044.151.562,-
2. Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat, dan juga tidak memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan dibawahnya dalam bentuk Tugas Pembantuan.
3. Dokumen LKPJ Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 akan menjadi masukan terhadap penyusunan LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.